

Pemikiran Sartono Kartodirdjo Tentang Sejarah Perkotaan

Purnawan Basundoro^{1*}

¹Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Indonesia

Email: pbasundoro@fib.unair.ac.id*

*Korespondensi



Received: 03-02-2024, Revised: 17-05-2024, Accepted: 17-05-2024, Published: 29-05-2024

Abstrak

Tulisan ini menggali pandangan Sartono Kartodirdjo mengenai kajian perkotaan di Indonesia, khususnya pendapatnya mengenai kota. Makalah ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Bahan pustaka yang dijadikan acuan penulisan ini adalah berbagai literatur karya Sartono Kartodirdjo yang mencerminkan pemikirannya, khususnya yang membahas tentang perkotaan. Sartono menunjukkan antusiasme yang cukup dalam melihat kota sebagai unit kajian sejarah, memosisikan kota sebagai pusat modernisasi. Instrumen utama modernisasi di perkotaan adalah sarana komunikasi, pendidikan, dan surat kabar atau media massa. Modernisasi di perkotaan telah membawa Indonesia menuju pintu kemerdekaan karena munculnya kesadaran baru di kalangan elite terpelajar di perkotaan. Dengan demikian, kota ikut berkontribusi dan berperan penting dalam sejarah Indonesia paling tidak dari sisi pandangan akademik Sartono Kartodirdjo.

Kata Kunci: modernisasi; pemikiran; sejarah perkotaan

Abstract

This article explores Sartono Kartodirdjo's views regarding urban studies in Indonesia, especially his opinions regarding cities. This paper was written using library research methods. The library material used as a reference for this writing is various literature by Sartono Kartodirdjo which reflects his thoughts, especially those that discuss urban areas. Sartono showed sufficient enthusiasm in seeing the city as a historical study unit, positioning the city as a center of modernization. The main instruments of modernization in urban areas are means of communication, education, and newspapers or mass media. Modernization in urban areas has brought Indonesia towards the door of independence due to the emergence of a new awareness among the educated elite in urban areas. In this way, cities contribute and play an important role in Indonesian history, at least from Sartono Kartodirdjo's academic perspective.

Keywords: modernization; thinking; urban history



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Apakah Sartono Kartodirdjo memikirkan perkotaan sebagai kajian sejarah? Sebagian besar akademisi Indonesia lebih mengenal Sartono sebagai pengkaji sejarah pedesaan, bukan saja karena disertasinya bertemakan pemberontakan petan (Kartodirdjo, 1984) namun juga karena pada awal 1970-an ia ditugaskan

oleh Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi Ketua Pusat Penelitian Pengembangan Pedesaan dan Kawasan (P3PK). Dua hal tersebut seolah menjadi trademark bahwa Sartono adalah ahli sejarah pedesaan. Selain itu, kajian Sartono yang lain pada umumnya adalah mengenai perkembangan historiografi (Kartodirdjo, 1963, pp. 22-30), nasionalisme (Kartodirdjo, 1962, pp. 67-94), serta kelas-kelas sosial.

Fokus keahlian Sartono lahir menyesuaikan zaman, yaitu ketika kajian-kajian mengenai petani dan kawasan pedesaan sedang marak. Akademisi yang muncul dan berkembang seangkatan dengan beliau rata-rata mengambil kawasan pedesaan sebagai fokus kajian, walaupun ada satu atau dua yang mengkaji perkotaan. Beberapa nama bisa disebutkan, antara lain: Jan Breman (1986), Robert van Niel (2003), Clifford Geertz (1989), Peter Boomgard (2004), dan lain-lain.

Maraknya kajian pedesaan pada waktu itu merupakan imbas dari kebijakan kolonial Belanda selama abad ke-19 yang menjadikan petani dan pedesaan sebagai fokus utama kebijakan mereka. Kebijakan utama yang mereka jalankan adalah Sistem Tanam Paksa. Kebijakan ini murni sebuah upaya untuk memperdalam eksploitasi Indonesia, khususnya Jawa, sebagai upaya untuk menambah anggaran Negeri Belanda yang terkuras hebat selama Perang Diponegoro atau yang populer dengan sebutan Perang Jawa/Java Oorlog (1825-1830) (Houben, 2002, pp. 18-27).

Sistem Tanam Paksa berhasil sangat baik. Keuangan Negeri Belanda berangsur-angsur membaik berkat perdagangan komoditas pertanian dari hasil Sistem Tanam Paksa. Posisi pedesaan Jawa yang sangat subur telah menolong Negeri Belanda, sehingga sebagaimana dikatakan oleh J. C. Baud, gubernur jenderal pengganti van den Bosch, bahwa Hindia adalah gabus yang di atasnya Belanda mengapung (Ricklefs, 2008, p. 266).

Kebijakan Sistem Tanam Paksa membawa perubahan yang sangat masif di pedesaan Jawa (Ricklefs, 2008, p. 267). Hal tersebut dirasakan sampai awal kemerdekaan. Desa telah terbuka sedemikian rupa sehingga menarik perhatian para akademisi untuk menelitinya. Pedesaan menjadi lapangan penelitian yang sangat eksotis, sehingga sejak tahun 1950-an sampai 1980-an puluhan peneliti, sebagian besar adalah indonesianis, menjadikan pedesaan sebagai fokus kajian mereka. Di sinilah Sartono terseret dalam arus besar para ilmuwan untuk turun ke pedesaan Indonesia. Apakah Sartono sama sekali tidak memikirkan kota? Melalui tulisan-tulisan yang pernah beliau hasilkan, makalah ini akan mengulik pandangan beliau mengenai kajian perkotaan di Indonesia, terutama apa yang beliau pikirkan mengenai kota.

Metode

Makalah ini ditulis dengan metode penelitian pustaka. Bahan-bahan pustaka yang dipakai sebagai rujukan untuk menulis makalah ini adalah berbagai pustaka yang ditulis oleh Sartono Kartodirdjo yang mencerminkan pemikiran beliau, utamanya yang membahas perkotaan. Sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan, Sartono lebih dikenal sebagai sejarawan yang intensif meneliti aspek pedesaan. Namun demikian, terdapat beberapa tulisan yang menyinggung tema perkotaan sebagai bagian dari pembahasan lain yang jauh lebih menonjol.

Tulisan tersebut disarikan dan dianalisis pemikiran-pemikiran mengenai perkotaan. Apa saja yang dibahas dan dibayangkan oleh Sartono mengenai kota

kemudian dibahas dalam makalah ini. Secara garis besar pemikiran Sartono mengenai kota bisa dibagi menjadi dua, yaitu mengenai kota-kota kuno di Nusantara serta mengenai kota-kota modern. Yang disebut kota kuno adalah kota-kota yang eksis pada periode prakolonial sebelum abad ke-17, terutama kota-kota pantai yang telah berperan sebagai tempat persinggahan para pedagang global. Kota-kota modern adalah kota-kota setelah mendapatkan sentuhan Barat sebagai dampak dari kolonialisme. Kota-kota tersebut pada umumnya dibangun oleh kolonial Belanda sebagai tempat bermukim, perkantoran, aktivitas bisnis, serta aktivitas politik. Kota-kota tersebut pada umumnya semakin berkembang setelah Indonesia lepas dari penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka.

Kota-kota Kuno

Kuliah Sartono pada jenjang S2 di Yale University Amerika Serikat dibimbing oleh W. F. Wertheim. Ia adalah seorang sosiolog kritis, dan telah lama mengamati Indonesia. Salah satu buku terpenting yang ditulis oleh Wertheim mengenai Indonesia adalah *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*. Nah, salah satu bab dari buku menjelaskan berbagai perubahan yang terjadi di kota-kota Indonesia (Wertheim, 1964). Sartono pasti membaca buku yang terbit tahun 1956, dengan demikian dipastikan pemikiran tentang kota yang ditulis oleh gurunya meresap juga pada dirinya. Terdapat beberapa buku yang ditulis oleh Sartono menyinggung tema perkotaan walaupun tidak dijadikan tema utama.

Pada Oktober 1987, penerbit Gramedia menerbitkan buku yang ditulis oleh Sartono yang terdiri dua jilid. Jilid pertama berjudul Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900: Dari Emporium sampai Imperium. Jilid kedua berjudul Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme. Kita cermati pada buku pertama, apakah terdapat bagian dari buku ini membahas kota atau tidak. Menilik judulnya, emporium, artinya pusat perdagangan; pusat perbelanjaan; gudang besar yang berisi berbagai barang dagangan (<https://kbbi.web.id/emporium>). Sartono tentu saja membahas kota dalam buku ini. Emporium yang dibahas oleh Sartono mengacu pada kota-kota kuno pada abad ke-16, sebagaimana lingkup waktu yang dibahas dalam buku ini. Ia membayangkan bahwa Indonesia yang awalnya hanya sebagai titik-titik kota dagang (emporium) yang tersebar di berbagai tempat pada akhirnya berhasil dibangun menjadi kerajaan (Belanda) di tanah seberang.

Menurut Sartono, tahun 1500 situasi Nusantara digambarkan sedang mengalami proliferasi kekuasaan. Periode ini merupakan fase baru dalam sejarah, terutama untuk kota-kota pelabuhan. Pada periode ini globalisasi perdagangan meningkat pesat. Para pedagang dari berbagai negara mengunjungi kota-kota pelabuhan Nusantara. Kota pelabuhan berkembang menjadi tempat penumpukan barang dagangan, di mana perdagangan internasional diselenggarakan. Penumpukan barang inilah yang lazim disebut emporium. Saat itulah para penguasa setempat juga mengambil bagian dalam pelayaran dan perdagangan. Internasionalisasi perdagangan menjadi faktor yang turut memengaruhi perkembangan kota. Dalam pandangan Sartono, faktor eksternal memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kota-kota pantai, terutama faktor yang bersifat kultural. Keluar-masuknya pedagang dari luar telah membawa unsur-unsur kultural yang mengubah kota setempat, seperti sistem kepercayaan sistem politik,

serta berbagai unsur kebudayaan lainnya: kesenian, kesusasteraan, filsafat, dan lain-lain.

Berbagai unsur dari luar tersebut ketika bersentuhan dengan unsur lokal tentu saja membawa kegoncangan, terutama menyangkut kekuasaan dan kultural yang telah bercokol lama. Beberapa emporium utama yang terbentuk pada periode awal, di luar Jawa bisa disebut: ibu kota Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, serta Malaka di semenanjung Malaysia. Di Jawa, kota utama yang berkembang menjadi penampungan barang-barang dagangan internasional adalah Tuban. Sriwijaya, Malaka, dan Tuban merupakan kota-kota yang mengalami perkembangan hampir bersamaan. Ketiga kota tersebut juga memiliki hubungan erat sebagai kota dagang.

Sartono meletakkan kota-kota pantai periode awal tersebut sebagai kota dagang. Berbagai kejadian yang kemudian timbul di tempat tersebut juga disebabkan karena dinamika perdagangan. Struktur kota pantai yang menjadi pusat perdagangan digambarkan memiliki bangunan pasar yang menonjol sebagai tempat jual-beli komoditas perdagangan. Pasar digambarkan sebagai bangunan-bangunan yang membujur pantai. Biasanya para pedagang dari luar pulau memiliki lokasi tinggal sendiri-sendiri, mengelompok menurut asal mereka. Menurut Sartono para pedagang dari Nusantara dan Cina yang berkunjung ke Malaka tinggal di sebelah selatan Sungai Malaka, yaitu di daerah hilir. Sedangkan para pedagang dari Eropa dan negara-negara Barat lainnya tinggal di sebelah utara sungai. Kawasan perdagangan tersebut terletak di daerah Upih (Kartodirdjo, 1992, p. 11).

Peran kota-kota pantai di Nusantara mengalami pergeseran setelah bangsa-bangsa Barat memiliki ambisi yang melampaui kegiatan perdagangan. Malaka pada awal abad ke-16 jatuh ke tangan Portugis setelah bangsa ini menyimpangkan niatnya dari sekedar berdagang menjadi kolonialisme, di mana mereka menempatkan diri sebagai penjajah sementara bangsa-bangsa Bumiputra sebagai terjajah. Hubungan antara keduanya tidak setara lagi layaknya perdagangan. Era internasionalisasi perdagangan di seluruh perairan Nusantara surut berbarengan dengan dominasi Barat. Belanda

Kota sejak Masa Kolonial

Kota-kota pantai berangsur-angsur berubah menjadi tempat kedudukan politik penjajah. Ketika pada akhirnya Portugis tergeser oleh dominasi Belanda, kota-kota pantai berubah menjadi tempat kedudukan administratif di mana para pejabat VOC berkantor. Walaupun tidak ada penjelasan detilnya, nampaknya Sartono melihat bahwa selama abad ke-18 sampai awal abad ke-20, kota-kota di Indonesia perlahan-lahan berubah menjadi kota yang bercorak kolonial murni. Kota-kota kolonial ditandai dengan dominasi Barat pada segala aspek, baik secara politik, ekonomi, budaya, serta aspek fisik penataan kota.

Dominasi Barat di perkotaan tentu saja berdampak dengan terciptanya stratifikasi sosial baru. Orang-orang Barat dengan kekuatan politik, sosial, dan ekonomi menjadi kelas sosial yang menempati posisi tertinggi, disusul dengan golongan timur asing (*vreemde oosterlingen*). Masyarakat Bumiputra dalam struktur sosial periode ini berada pada posisi paling bawah. Stratifikasi sosial yang terbentuk di perkotaan selain berdasarkan pada perbedaan kebangsaan, juga terbentuk berdasarkan status sosial dan ekonomi, di mana orang-orang kaya menempati

lapisan atas sedangkan orang-orang miskin atau *wong cilik* berada pada lapisan paling bawah.

a. Kota dan Stratifikasi Sosial Baru

Sartono dalam bukunya Pengantar Sejarah Indonesia Baru Jilid I merekam beberapa hal terkait dengan kota-kota yang mengalami perkembangan drastis karena pengaruh kolonialisme. Pendidikan menjadi penanda perubahan paling signifikan mengenai hal tersebut karena pendidikan merupakan unsur yang memengaruhi sektor-sektor yang lain secara signifikan. Terintegrasinya masyarakat Bumiputra ke dalam sistem pendidikan Barat telah membuka mata dan pola pikir mereka terhadap dunia yang lebih luas. Keputusan untuk membuka sekolah-sekolah bagi anak-anak Bumiputra bukanlah keputusan yang sekali jadi, melainkan hasil dari sebuah diskusi panjang yang kadang bertele-tele karena banyaknya pertimbangan mengenai hal tersebut. Pada tanggal 30 September 1848 kelurah keputusan Kerajaan Belanda Nomor 95 yang memberi wewenang kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk menyediakan biaya sebesar f 25.000 setahun untuk membiayai pendirian sekolah-sekolah Bumiputra. Tujuan utama pendirian sekolah tersebut adalah untuk mendidik calon-calon pegawai negeri dari kalangan Bumiputra (Mestoko, 1985, p. 92).

Berdasarkan catatan Sartono, sekolah pertama yang dibuka di Indonesia adalah sekolah guru di Solo pada tahun 1852. Kota Solo dipilih sebagai tempat pendirian sekolah guru pertama, karena kota ini adalah pusat peradaban Jawa. Di kota ini masih berdiri kraton yang menjadi tempat persemaian dan perkembangan kebudayaan Jawa. Dalam konteks ini Sartono menempatkan kota sebagai pusat peradaban yang menjadi sumber inspirasi untuk pembelajaran. Saat itu Solo merupakan pusat studi bahasa Jawa di mana sarjana-sarjana Barat melakukan studinya. Mereka inilah yang kemudian diperbantukan untuk menyusun buku-buku sekolah. Dalam pemikiran Sartono, kota telah berfungsi ibarat cahaya lampu peradaban yang menyinari Jawa pada saat itu. Semua unsur kemajuan negeri dimulai dari kota.

Setelah pemerintah berhasil mendirikan sekolah guru di Solo, sekolah-sekolah lain didirikan di berbagai kota di Indonesia, menjadi tempat persemaian calon-calon elit modern pada saat itu, sebagaimana digambarkan oleh Robert van Niel dalam kajiannya (van Niel, 1984). Menurut van Niel perkembangan elit di Indonesia adalah dari yang bersifat tradisional yang berorientasi kosmologis dan berdasarkan keturunan kepada elit modern yang berorientasi kepada negara kemakmuran berdasarkan pendidikan (van Niel, 1984, p. 12). Dalam konteks ini kota adalah ruang tempat di mana modernisasi disemai dan dikembangkan dengan pendidikan sebagai pupuk utama untuk menyuburkan pertumbuhan ide-ide modernisasi tersebut. Hal ini ditegaskan kembali dalam buku Pengantar Sejarah Indonesia Baru Jilid II.

Pada buku tersebut Sartono secara khusus membahas kota dalam bab tersendiri, yaitu pada bab III dengan judul Kehidupan Kekotaan. Pada bagian ini Sartono terlebih dahulu memberi penjelasan mengenai perubahan kota-kota di Indonesia pada awal abad ke-20. Menurutnya kota-kota di Indonesia mengalami peningkatan fungsi dan perubahan sangat drastis sejak awal abad ke-20, terutama pada kota-kota yang diberi *status haminte (gemeente)* atau kotapraja

(Kartodirdjo, 1990). Pada tahun 1903 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan *Desentralisatie Wet*, yang menjadi dasar dibentuknya kota-kota otonom dengan status gemeente. Implementasi undang-undang tersebut dimulai tahun 1905, dengan diberikannya status otonom kepada kota-kota tertentu yang biasanya memiliki penduduk Eropa cukup banyak (Basundoro, 2012, pp. 106). Pemberian status kota yang berbasis pada kedudukan orang-orang Eropa juga mencerminkan adanya diskriminasi. Kota-kota yang diberi status otonom ditempatkan dalam posisi yang cukup istimewa karena mereka diberi hak untuk mengatur kota tersebut dengan program-program yang lebih menguntungkan orang-orang Eropa tersebut. Pembangunan fasilitas perkotaan lebih banyak diperuntukkan untuk golongan mereka.

Kota-kota pada awal abad ke-20, sebagaimana dipahami oleh Sartono, memperlihatkan aspek fisik yang berbeda jauh dengan wilayah pedesaan. Kota ditandai dengan bangunan-bangunan yang lebih rapat dengan fungsi yang jauh lebih heterogen. Kota-kota yang maju secara fisik memiliki hubungan erat dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Sebagaimana telah diungkap pada buku jilid 1, pada buku jilid 2 Sartono membahas lebih detil mengenai perkembangan pendidikan di perkotaan. Pendidikan modern ternyata telah menciptakan kontras sosial antar golongan yang mencolok. Kelas-kelas sosial baru terbentuk di perkotaan sebagai dampak munculnya sekolah dengan jenjang yang cukup beragam.

Sartono memang tidak menyebut kontras sosial atau kelas sosial, namun menggantinya dengan istilah stratifikasi sosial. Menurut sosiolog Pitirim A. Sorokin, stratifikasi sosial (*social stratification*) adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hirarkis). Perwujudannya adalah kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah (Sorokin, 1959, p. 11). Stratifikasi sosial yang terbentuk di kota-kota kolonial, khususnya di Jawa, cukup rumit. Profesi- profesi baru yang muncul akibat meningkatnya kepentingan kolonial Belanda di perkotaan telah menciptakan stratifikasi sosial yang amat berbeda dengan kondisi pada masa prakolonial yang lebih didasarkan pada feodalisme.

Menurut Sartono, komunitas-komunitas di perkotaan terdiri atas unsur-unsur profesional yang mengelompok menurut bidang masing-masing, serta menurut status sebagai pejabat pada umumnya. Secara umum golongan profesional di perkotaan pada masa kolonial bisa dikelompokkan menjadi dua berdasarkan asal-usul kebangsaan mereka. Pertama, para pejabat kolonial yang menguasai hampir semua jabatan strategis di perkotaan, baik di lembaga-lembaga negara (jajahan) maupun di perusahaan-perusahaan swasta. Kedua, para pejabat Bumiputra yang sebagian besar merupakan pejabat pangreh praja (*binnenlands bestuur*). Selain itu, berkat pendidikan Barat yang mulai bisa diakses oleh anak-anak Bumiputra beberapa jabatan yang semula hanya diemban oleh orang-orang Belanda akhirnya bisa juga dijabat oleh Bumiputra, seperti dokter, guru, staf administrasi, dan lain-lain.

Stratifikasi sosial tentu saja juga terbentuk di internal masyarakat Bumiputra. Menurut Sartono, tinggi-rendahnya jabatan dan kepangkatan menjadi pembeda antara priyayi gedhe dan priyayi cilik, sementara rakyat kelas bawah dikategorikan sebagai wong cilik. Terkait kategori wong cilik, nanti dalam periode kemerdekaan

diceritakan tersendiri pada kajian yang dilakukan oleh Sartono mengenai becak di Kota Yogyakarta (Kartodirdjo, 1981; Kartodirdjo, 2021).

b. Wong Cilik di Perkotaan

Salah satu kelompok sosial yang menjadi perhatian Sartono adalah wong cilik, yaitu kelas sosial paling bawah dalam masyarakat Indonesia. Konsep wong cilik sering muncul dalam berbagai periode sejarah, dan menarik minat para ilmuwan sosial untuk menelitinya. Sukarno adalah salah satu pendiri bangsa Indonesia yang menjadikan konsep wong cilik sebagai salah satu isu perjuangan menentang kolonialisme Belanda. Wong cilik dalam imajinasi Sukarno direpresentasikan sebagai Pak Marhen, sosok petani kecil yang ia jumpai di pinggiran Kota Bandung. Ia jadikan nama Marhen sebagai ideologi yang digunakan untuk memperjuangkan orang-orang kelas bawah yang miskin, yang ia namakan marhenisme (Adams, 2014, pp. 73-81).

Menurut Sartono, kota juga menjadi tempat hidup wong cilik. Mereka tinggal di kampung, yang merupakan tempat tinggal penduduk lama di kota bersama dengan pendatang yang berasal dari desa. Pada umumnya profesi wong cilik adalah sebagai tenaga buruh, pedagang kecil, pembantu rumah tangga, dan sebagainya (Kartodirdjo, 1990, p. 96). Perbedaan antara wong cilik dengan kelompok sosial yang lebih tinggi bisa dilihat dari gaya hidup keseharian mereka, mulai dari pakaian, makanan, sampai unsur-unsur budaya yang mereka anut.

Mengacu pada narasi di atas, kota kolonial dalam pandangan Sartono adalah tempat bercokolnya kultur feodalisme yang cikal-bakalnya jauh ke periode kuno dalam sejarah Indonesia. Hadirnya orang-orang Barat yang menjalankan politik kolonialisme tidak melunturkan budaya feodal, tetapi justru malah melanggengkannya. Pendidikan Barat yang dianggap lebih rasional ternyata malah menghasilkan golongan sosial baru yang menambah lapisan sosial dalam stratifikasi baru yang terbentuk di perkotaan. Ketika Indonesia merdeka, pelapisan sosial yang terbentuk pada masa kolonial tidak serta-merta terhapus, walaupun kita tahu bahwa salah satu tujuan perjuangan kemerdekaan adalah mencapai masyarakat yang sederajat yang bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Wong cilik tetap menjadi bagian dari perkembangan kota-kota di Indonesia pascakemerdekaan.

Kajian Sartono mengenai becak di Yogyakarta bisa menjadi bahan untuk melihat bagaimana ia memandang dan memikirkan kota di Indonesia pascakemerdekaan, serta bagaimana posisi kota bagi wong cilik. Sartono, dengan mengacu kepada pandangan umum serta berdasarkan data-data pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta, membuat pernyataan bahwa kota merupakan tempat tujuan masyarakat pendatang dari pedesaan. Mereka menjadi bagian dari arus urbanisasi untuk mencari penghidupan yang lebih baik di perkotaan. Selain itu tumbuhnya lembaga pendidikan di Kota Yogyakarta juga menjadi faktor pendorong bagi orang-orang untuk mendatangi kota ini (Kartodirdjo, 2021, p. 19). Pada perkembangan berikutnya kota ini bahkan mendapatkan julukan sebagai Kota Pendidikan.

Para pendatang yang bertujuan mencari penghidupan di kota pada umumnya berasal dari golongan menengah ke bawah atau wong cilik. Mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk bekerja di sektor-sektor formal terpaksa harus rela

bekerja di sektor informal, salah satunya menjadi tukang becak. Keberadaan tukang becak di perkotaan bisa dikatakan merupakan pelanggaran kemiskinan, karena berdasarkan temuan Sartono sebagian besar tukang becak merupakan anak dari orang-orang miskin di pedesaan. Terlepas dari itu, keberadaan tukang becak di perkotaan telah menciptakan sistem transportasi yang bisa menjangkau kawasan-kawasan sulit yang tidak bisa dilayani oleh moda transportasi massal seperti bis kota. Becak juga merupakan transportasi alternatif yang bisa diakses tanpa mengenal waktu dan menjadi penghubung (*feeder*) ke transportasi massal.

c. Kota sebagai Pusat Modernisasi

Kota dalam pengamatan Sartono juga merupakan pusat modernisasi di mana pemikiran-pemikiran progresif dikembangkan yang berimbas pada semakin terbukanya pemikiran warga kota. Sejarah pergerakan nasional sebagaimana dituliskan oleh Sartono pada bukunya Pengantar Sejarah Indonesia Baru Jilid 2 lahir karena perubahan-perubahan drastis di perkotaan Indonesia sebagai dampak dari modernisasi (Kartodirdjo, 1990, p. 100). Komunikasi yang semakin mudah telah memungkinkan ide-ide progresif tersebar dengan cepat dengan jangkauan yang jauh lebih luas. Kemudahan komunikasi disebabkan oleh jaringan jalan di Jawa yang berkembang sangat cepat sejak dibangunnya Jalan Raya Pos (*Grote Postweg*) oleh Daendels pada awal abad ke-19, dilanjutkan dengan pembangunan jaringan kereta api yang dimulai tahun 1860 (Kartodirdjo, 1992, p. 362).

Surat kabar juga instrumen lain yang mempercepat modernisasi di kota-kota di Indonesia selama masa kolonial. Kesadaran baru untuk mendirikan berbagai organisasi modern yang menjadi penggerak perlawanan terhadap kolonialisme selama periode pergerakan nasional tidak bisa dipisahkan dengan berdirinya banyak perusahaan surat kabar di berbagai kota di Indonesia. Kota telah memperlihatkan meluapnya aspirasi untuk mencapai kemajuan di kalangan kaum terpelajar yang mengidentifikasikan dirinya sebagai kaum maju. Ide-ide kemajuan mereka salurkan melalui tulisan di surat kabar. Modernisasi yang berkembang di perkotaan tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan pendidikan yang semakin baik yang bisa diserap oleh masyarakat Bumiputra perkotaan.

Kesimpulan

Sebagai sejarawan yang lebih dikenal sebagai pengkaji kawasan pedesaan, pemikiran mengenai perkotaan ternyata juga mendalam, walaupun hanya berupa suplemen yang menempel pada kajian sejarah Indonesia secara umum. Perkembangan kota-kota di Indonesia sebagaimana diperlihatkan oleh Sartono memiliki kecenderungan sebagai imbas dari kolonialisme Belanda. Aspek-aspek sosial, politik, kebudayaan, ekonomi yang berkembang di perkotaan telah memperlihatkan dominasi Barat yang sangat kental. Salah satu fokus dari pemikiran Sartono adalah terbentuknya stratifikasi sosial di perkotaan. Secara umum stratifikasi sosial di Indonesia telah terbentuk lama sebelum periode kolonial, tetapi diberlakukannya pendidikan Barat modern oleh kolonial Belanda ternyata tidak dengan serta-merta menghapus stratifikasi sosial tersebut. Pendidikan Barat justru telah menciptakan stratifikasi sosial baru yang hanya mengubah sedikit saja dari yang lama.

Sartono ternyata memperlihatkan antusiasme yang cukup mendalam dalam melihat kota, dengan memposisikan kota sebagai pusat modernisasi. Instrumen utama modernisasi di perkotaan adalah sarana komunikasi, pendidikan, dan surat kabar atau media massa. Modernisasi di perkotaan telah mengantarkan Indonesia menuju pintu kemerdekaan karena munculnya kesadaran baru dari elit terpelajar di perkotaan. Perlu penelitian yang lebih mendalam untuk menyelami pemikiran Sartono mengenai perkotaan Indonesia secara umum.

Referensi

- Adams, C. (2014). *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bung Karno dan Penerbit Media Pressindo.
- Basundoro, P. (2012). *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Ombak.
- Boomgaard, P. (2004). *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*. Jakarta: KITLV Jakarta dan Djambatan .
- Breman, J. (1986). *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial*. Jakarta: LP3ES.
- Geertz, C. (1989). *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Houben, V. J. H. (2002). *Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- <https://kbbi.web.id/emporium>.
- Kartodirdjo, S. (1962). Some Problems on the Genesis of Nationalism in Indonesia. *Journal of Southeast Asian History*, 3(1), 67-94. <https://doi.org/10.1017/S0217781100000569>.
- Kartodirdjo, S. (1963). Historical Study and Historians in Indonesia Today. *Journal of Southeast Asian History*, 4(1), 22-30. <https://doi.org/10.1017/S0217781100000740>.
- Kartodirdjo, S. (1981). *The Pedicab in Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kartodirdjo, S. (1984). *Pemberontakan Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Kartodirdjo, S. (1990). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900, dari Emporium sampai Imperium*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, S. (2021). *Becak di Yogyakarta*. Yogyakarta: Ombak.
- Mestoko, S., et al. (1985). *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi Ilmu.

Sorokin, P. A. (1959). *Social and Cultural Mobility*. London: The Free Press of Glencoe.

van Niel, R. (1984). *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

van Niel, R. (2003). *Sistem Tanam Paksa di Jawa*. Jakarta: LP3E.

Wertheim, W. F. (1964). *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*. The Hague: W. van Hoeve Ltd.